

THE INDONESIAN JOURNALISTS ASSOCIATION (PWI) IN RIAU DURING THE NEW ORDER ERA 1968-1998

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau Pada Masa Orde Baru Tahun 1968-1998

Dhanti Salsabila Azis ^{1a(*)} Bunari ^{2b} Ahmal^{3c}

¹²³Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Riau

^adhanti.salsabila2895@student.unri.ac.id

^bbunari@lecturer.unri.ac.id

^cahmal@lecturer.unri.ac.id

(*) Corresponding Author

dhanti.salsabila2895@student.unri.ac.id

How to Cite: Dhanti Salsabila Azis. (2024). Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau Pada Masa Orde Baru Tahun 1968-1998. doi: 10.36526/js.v3i2.3945

Received: 18-04-2024
Revised : 11-04-2024
Accepted: 25-06-2024

Keywords:

Wartawan,
PWI,
Pemerintah,
Pers.

Abstract

This study aims to uncover and analyze the changes in the lives of journalists in the Indonesian Journalists Association (PWI) of Riau during the New Order period from 1968 to 1998. This research is focus on the strong influence of the New Order government on the press and how these policies shaped the dynamics of journalists' lives in Riau. This research uses a historical methodology. Primary data was obtained through in-depth interviews with journalists active during the period, while secondary data was gathered from various literature, archives, and official documents relevant to the research topic. This approach allows the researcher to gain a deep understanding of the experiences and challenges faced by journalists in Riau during the New Order era. The research findings show that the authoritarian policies of the New Order government significantly impacted press freedom and the journalism profession in Riau. Journalists experienced significant pressure from the government, including the closure of newspapers and the requirement to become members of the government-recognized PWI. These conditions affected journalistic integrity and freedom of expression, as well as the quality of information delivered to the public.

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Penerangan Indonesia tahun 1969 menyebutkan, para wartawan Indonesia diwajibkan menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah disahkan pemerintah. Hingga Juni 1998 hanya satu organisasi, Persatuan Wartawan Indonesia yang diakui. Organisasi PWI sangat ketat diatur pemerintah, pemimpinya seringkali pensiunan militer maupun yang masih aktif, atau fungsionaris Golkar (David T. Hill, 2011).

Pers Indonesia zaman Orde Baru tunduk pada sistem politik atau pemerintah, pada masa ini sebuah perusahaan pers yang akan didirikan harus memiliki Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP) yang diatur dalam Permenpen No. 01/Pers/Menpen 1984, yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan (DEPPEN), hal ini dapat menilai bahwa pemerintah memiliki legitimasi dalam mengekang kebebasan pers, padahal dalam UU Pokok Pers No. 11 Tahun 1996 mengatur dan menjamin kebebasan dalam menyiarkan pemberitaan. Apalagi kedudukan Undang-Undang seharusnya lebih kuat dibandingkan dengan Permenpen (Sri H.A, 2015).

Menurut (Asril, 2002), di Riau, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, pemuka adat, cendekiawan, generasi muda, dan pers, dirangkul oleh Gubernur Riau yang ke-4 yaitu Raden Haji Soebrantas Siswanto. Ketika pertama kali dilantik sebagai Gubernur Riau pada tahun 1978, proyek pertama yang diresmikannya adalah pembangunan Balai Wartawan Riau di Jalan Sumatera, Pekanbaru. Figur rakyat ini begitu tersentuh melihat para wartawan berkeliaran kemana-mana karena tidak ada "markasnya". Maka untuk pertama kalinya secara resmi wartawan Riau mempunyai

tempat berkumpul. Sebelumnya, kantor PWI (ketika itu satu-satunya organisasi pers) selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, karena tidak punya gedung permanen. PWI di Riau untuk pertama kalinya diketuai oleh H. Moeslim Roesli yang menjabat pada tahun 1966-1968.

Sebelumnya, pada bulan Agustus 1963 pernah dibentuk pengurus Perwakilan Sementara PWI Riau dengan susunan sebagai berikut : Aspan Diar – Ketua, A. Moeis Hadjads – Wakil Ketua, Noerbahrij Joesoef – Sekretaris, G.N.T Ilyas – Wakil Sekretaris, Harun Al Rasyid – Bendahara, dilengkapai dua Komisaris, A. Rachman Junus XI. Seseegeranya status Perwakilan PWI Pekanbaru definitif disahkan kongres nanti, maka pengurus harus mengadakan rapat anggota untuk memilih pengurus perwakilan definitif (Kurniadi, 2018). Menurut (Hartono, 2019), Ketika PWI Riau sudah terbentuk pada tahun 1963, terpilih H. Moeslim Roesli sebagai ketua pertamanya, beliau juga berhasil mengusulkan dan meningkatkan status PWI Riau yang sebelumnya berstatus perwakilan menjadi PWI Cabang Riau.

Penelitian tentang PWI Riau selama periode Orde Baru adalah penting untuk memahami sejarah kebebasan pers di Indonesia, kontribusi media lokal terhadap dinamika nasional, dan sebagai upaya mendokumentasikan serta melestarikan sejarah media di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan pelajaran berharga untuk masa kini dan masa depan dalam menjaga kebebasan pers dan integritas jurnalistik

METODE

Sesuai dengan karakteristik objek penelitian berupa berbagai peristiwa di masa lampau, maka metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menyusun penelitian ini adalah metode Historis. Metode historis yaitu metode yang berusaha mengkaji peristiwa-peristiwa masa lampau, mendeskripsikan serta menganalisis fakta-fakta tersebut secara mendalam. Dalam metode historis terdapat empat tahap yang terdiri dari yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

a. Heuristik.

Menurut (Suhartono dan Pranoto, 2010), heuristik merupakan tahapan pertama dalam melakukan penulisan sejarah. Heuristik berasal dari bahasa Yunani *Heuriskein*, yang artinya mengumpulkan atau menemukan sumber. Sumber sejarah adalah sejumlah materi sejarah yang tersebar dan teridentifikasi. Sumber yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber lisan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan PWI yang ada di Riau serta narasumber lainnya yang masih relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain menggunakan sumber lisan peneliti juga mengumpulkan sumber seperti dokumen, arsip, dan Surat Keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti juga akan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Kritik.

Setelah pengumpulan sumber dipandang cukup, tahap berikutnya adalah melakukan pengujian terhadap sumber yang sudah diperoleh melalui kritik ekstern dan intern (Gottschalk, 1983). Pada penelitian ini untuk menguji kebenaran sumber yang telah didapatkan, maka penulis melakukan tahap pengkajian dan perbandingan terhadap data-data yang telah ditemukan sehingga sumber-sumber yang telah terverifikasi dapat menghasilkan sebuah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Interpretasi.

Tahap ketiga adalah melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari proses kritik sumber. Pada tahap interpretasi penulis atau sejarawan dituntut untuk berimajinasi bagaimana masa lalu yang akan dibahas pada penelitian. Imajinasi pada interpretasi dibatasi oleh fakta-fakta sejarah yang ada. Pada tahap interpretasi memerlukan kehati-hatian agar tidak terjadi tulisan ilmiah yang bersifat subjektif. Fakta-fakta sejarah yang relevan dengan PWI dalam kontrol pemerintah Orde Baru disintesiskan melalui imajinasi, dan interpretasi untuk mencari hubungan antara satu fakta dengan fakta lainnya dalam kerangka hubungan

kronologis dan kausalitas. Dengan demikian eksplanasi mengenai PWI dalam kontrol pemerintah Orde Baru dapat secara utuh dan mendalam. Dalam tahap ini penggunaan konsep-konsep dan teori-teori ilmu sosial, berguna untuk membantu menjelaskan hubungan antarfakta.

d. Historiografi.

Tahap terakhir dalam metode adalah historiografi, yakni kegiatan merekonstruksi peristiwa sejarah ke dalam bentuk tulisan. Pada tahap ini penulis mengungkapkan hasil penelitian dengan bahasa yang baik dan benar, menyajikan data-data yang akurat dan membuat garis-garis umum yang akan diikuti secara jelas oleh pembaca. Dalam proses historiografi ini diperlukan imajinasi dari penulis agar fakta-fakta yang diperoleh dapat dirangkaikan menjadi sebuah kisah yang menarik untuk dibaca.

Data yang dijadikan sumber dalam metode historis ini ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan oleh peneliti adalah hasil wawancara dari tokoh-tokoh yang terkait mengenai Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau masa Orde Baru dan masa sekarang. Sumber lainnya yaitu seperti arsip-arsip yang dimiliki PWI Riau seperti buku putih PWI Riau, dan arsip foto ketua-ketua PWI Riau. Sumber sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau tersedia melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan diberbagai organisasi seperti dari profil PWI dan karya tulis tentang pers masa Orde Baru

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Terbentuknya PWI di Riau

Orde Baru mendudukkan relasi saling mengkait yang pelik antara kekangan keamanan dan undang-undang tangan besi yang mengendalikan pers (David, T. Hill, 2011). Media pers yang dianggap mengganggu pemerintah, akan ditutup secara paksa penerbitannya dan akan diizinkan terbit lagi dua bulan setelah pembredelannya. Hingga pada tahun 1969, pemerintah dalam Peraturan Menteri Penerangan menyebutkan bahwasanya para wartawan Indonesia harus menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang sudah disahkan oleh pemerintah. Artinya, pada masa Orde Baru, hanya satu organisasi pers yang diakui oleh pemerintah yaitu PWI. PWI di masa Orde Baru digambarkan seperti 'anak emas' karena para wartawan yang bergabung dengan PWI akan dijamin pekerjaannya dan kehidupannya. Meskipun begitu, PWI tetap saja berada di bawah aturan dan kendali pemerintahan Orde Baru. Hal ini terlihat dari para pejabat-pejabat PWI yang juga merupakan seorang TNI seperti ketua Komisi Pendidikan PWI dijabat oleh pensiunan Brigadir Jenderal M. Hilny Nasution dan Ketua Eksekutif PWI yang juga dipegang oleh pensiunan Brigadir Jenderal Sugeng Wijaya.

PWI tersebar luas diberbagai daerah Indonesia, termasuk salah satunya yang berada di Riau. PWI di Riau (saat itu bernama PWI Perwakilan Sementara Pekanbaru) pertama kali didirikan oleh Noerbahrij Joesoef pada tahun 1963 dan di ketuai oleh Aspan Diar pada tanggal 23 Januari 1964. Perjuangan para wartawan Riau dalam mendirikan organisasi PWI ini tidaklah mudah, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar PWI cabang dapat berdiri. Untuk mendirikan organisasi PWI di Riau saat itu, harus ada 15 wartawan dengan status 'Anggota Biasa' dan sekurang-kurangnya menerbitkan 2 pers (Ridar Hendri, Wawancara, 2023). Beberapa wartawan di Riau mulai memperjuangkan berdirinya organisasi PWI ini tahun 1962 dengan membentuk sebuah panitia persiapan yang diketuai oleh Aspan Diar dan A. Moeis Hadjads.

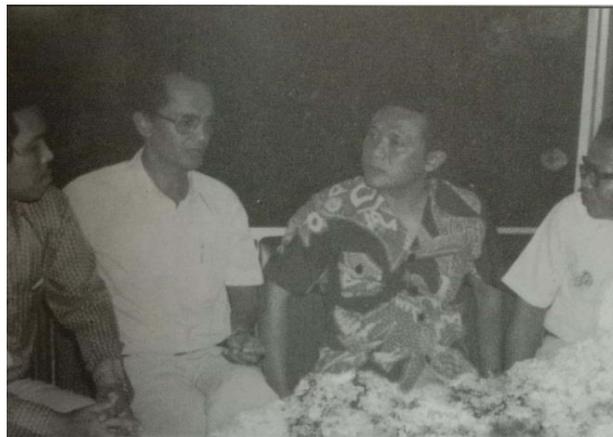
Tepat pada tanggal 25 Oktober 1963, sejumlah wartawan yang berdomisili di Pekanbaru mengadakan rapat pembentukan PWI Perwakilan Riau di Pekanbaru. Rapat yang dihadiri oleh Kepala Japen Provinsi Riau, M. Panggabean dan stafnya A. Dj. Jasin berhasil menyusun pengurus lengkap PWI Perwakilan Riau untuk pertama kalinya dengan susunan Ketua Aspan Diar, Wakil Ketua I A. Moeis Hadjads, Wakil Ketua II Moeslim Roesli, Wakil Ketua III A. Sjamari Siregar, Sekretaris I Noerbahrij Yoesoef, Sekretaris II Mawardi Ittam, dan Bendahara Harun Alrasyid.

Susunan pengurus PWI Perwakilan Riau itu dilaporkan ke PWI Pusat pada 27 Oktober 1963. Sekitar dua bulan kemudian, PWI Pusat mengesahkan kepengurusan PWI Perwakilan Riau melalui surat pengesahan bernomor 1/PP/64 tertanggal 23 Januari 1964 (Tim PWI Cabang Riau, 1996). Keinginan para wartawan dan pengurus PWI Cabang Riau untuk mempunyai gedung Balai Wartawan sendiri sudah cukup lama. Sejak periode kepengurusan pertama, keinginan tersebut telah dibicarakan. Pada kepengurusan selanjutnya, rencana tersebut mulai dikongkritkan dengan mengumpulkan sumber dana dari berbagai pihak. Diawali dengan mendirikan Yayasan Kesejahteraan Wartawan yang memiliki tujuan sebagai pengumpulan sumber dana pembangunan sekretariat PWI Riau.

Dipertengahan tahun 1964, rencana untuk membangun Balai Wartawan ini mendapat dukungan Gubernur Kaharuddin Nasution. Ia menunjuk lokasi dan tanah di samping Gedung Bhaskara Purna Yudha. Desain bangunan Balai Wartawan tersebut telah disiapkan oleh pihak Kanwil PU Riau. Pengurus PWI Perwakilan Riau kala itu segera menunjuk panitia pembangunan, khusus untuk pencarian dana. Kegiatan tersebut hampir setiap hari disiarkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru, agar masyarakat atau pihak-pihak yang membantu dapat mengetahuinya dan pihak lain dapat tergugah untuk memberi bantuan pula. Pengurus PWI melalui Yayasan Kesejahteraan Wartawan berhasil mengumpulkan uang sekitar Rp 3 juta. Dana tersebut didepositokan di bank BNI 1946. Namun, ketika terjadi pemotongan nilai uang Rp 1.000,- menjadi Rp 1,- maka nilai terakhir uang yang tersimpan itu tidak memadai untuk membiayai rencana pembangunan Balai Wartawan.

Balai Wartawan ini merupakan proyek pembangunan pertama yang diresmikan oleh Gubernur Soebrantas dengan biaya pembangunan sepenuhnya dari dana APBD Tk.I Riau. Salah seorang anggota pengurus PWI Cabang Riau, Rusydi S. Abrus (wakil sekretaris) yang juga menjadi Kepala Biro Humas Pemda Tk.I Riau, sangat aktif menjembatani rencana pembangunan Balai Wartawan tersebut (Tim PWI Cabang Riau, 1996). Ketika peresmian pembangunannya, dihadiri oleh Ketua PWI Pusat Harmoko.

Gambar 1. Ketua PP-PWI Harmoko Sesaat Menjelang Peresmian Balai Wartawan (1978)



Sumber: Buku Kata Pena Karangan Tim PWI Riau 1996.

Penyelesaian gedung tersebut ternyata dapat terselesaikan pada saat Soeripto – Gubernur Ke-6 Riau – menjabat pada tahun 1988-1998. Penggunaan Balai Wartawan Riau saat itu hanya diperuntukkan organisasi PWI saja, mengingat saat Orde Baru organisasi wartawan satu-satunya adalah PWI. Lain hal untuk organisasi wartawan lain seperti Serikat Pekerja Pers (SPP) dan Pokja Pekanbaru yang memiliki tempat berbeda dengan PWI.

Setelah Balai Wartawan yang didambakan selama ini menjadi kenyataan dimasa Gubernur HR. Soebrantas, maka kegiatan organisasi PWI Riau mulai menampakkan kiprahnya. Penamaan Balai Wartawan kemudian diubah menjadi Balai Wartawan Noerbahrij Joesoef yang berada di Jalan Sumatera, Pekanbaru. Penambahan nama Noerbahrij Joesoef tersebut agar masyarakat dapat mengetahui bahwasanya pendiri PWI Riau pertama adalah Noerbahrij Joesoef.

Pada masa reformasi, tepatnya disaat Gubernur yang ke-9 Riau – Annas Maamun – menjabat, diresmikanlah gedung wartawan baru yang bernama Gedung PWI Provinsi Riau. Gedung PWI Riau ini berada di Jalan Arifin Achmad, dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp. 9 miliar. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 2008 dan baru selesai pembangunannya di tahun 2014.

Peran dan Aktifitas PWI Riau Pada Masa Orde Baru

a. Peranan PWI Riau Terhadap Beberapa Media Massa di Riau Pada Masa Orde Baru

Peranan PWI Riau terhadap media massa pada awalnya terlihat ketika para pengurusnya memperjuangkan sebuah mesin cetak yang diketahui saat itu di Riau tepatnya di Pekanbaru belum sama sekali memiliki mesin cetak. Diketahui pada rentang waktu 1945-1965 di Riau khususnya Pekanbaru sudah ada beberapa percetakan. Namun, teknologi percetakan yang dipergunakan masih sangat sederhana. Mesin cetak yang digunakan saat itu hanya dipergunakan untuk membuat cetak undangan, kop surat dalam partai kecil.

Setelah disahkannya pengurus PWI Riau pada tahun 1964, maka pengurus-pengurusnya saat itu mengambil langkah terutama memperjuangkan satu unit mesin cetak lengkap yang berukuran besar. Pengurus PWI Riau menyurati Menteri Penerangan RI, H. Ruslan Abdulgani. Pihak PWI Riau kemudian memperjuangkan agar di Pekanbaru bisa memiliki mesin cetak dengan mengutus Moeslim Roesli yang waktu itu bekerja sebagai karyawan PT. Caltex Pacific Indonesia. Setelah melalui berbagai rintangan, Moeslim Roesli berhasil menemui Menteri Penerangan Ruslan Abdulgani dengan modal semangat untuk menembus belitan birokrasi. Berkat hal itu, Menteri Penerangan akhirnya bersedia membantu satu unit mesin cetak bekas milik percetakan Daya Upaya di Jakarta (PWI Cabang Riau, 1996).

Tidak hanya memperjuangkan mesin cetak yang akan digunakan oleh beberapa media massa saat itu, PWI Riau juga memiliki peran aktif di beberapa media massa. Keaktifan PWI – terutama pada PWI Riau – terlihat dari kegiatan-kegiatan para anggotanya yang sebagian berperan aktif dalam media surat kabar serta adapula yang merupakan pendiri media surat kabar. Hal ini dapat kita lihat dari salah satu tokoh wartawan yaitu Makmur Hendrik yang memiliki peran aktif dalam mengembangkan media surat kabar Genta. Ia direkrut oleh Yayasan Penerbit Masyarakat Sejarawan Indonesia (YP-MSI) pada tahun 1992. Makmur Hendrik juga pernah menjadi Wakil Pimpinan Redaksi (WPR) dan Penanggung Jawab (Penjab) surat kabar mingguan Genta pada tahun 1993-1996 (Tim PWI Cabang Riau, 1996).

Selain Makmur Hendrik yang berperan aktif di surat kabar Genta, Rida K Liamsi yang pernah menjabat sebagai Ketua PWI Riau pada tahun 1990 juga berperan aktif di surat kabar Riau Pos. Ia merupakan pendiri sekaligus ketua Riau Pos pertama pada tahun 1991. Rida pernah menjadi Pemimpin Redaksi skm. Genta atas rekomendasi PWI Cabang Riau. Surat rekomendasi dengan nomor 193/B-1/VII/1984 tersebut, ditandatangani oleh Moeslim Kawi (Ketua PWI tahun 1984) dan Rida K Liamsi (saat itu menjabat sebagai Sekretaris PWI Cabang Riau) pada 19 Juli 1984.

b. Peranan PWI Riau Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Wartawan di Provinsi Riau

Wartawan Indonesia pada saat sebelum kemerdekaan bahkan setelah kemerdekaan sebelum terbentuknya PWI, pada umumnya mengalami pasang surut bahkan kesulitan dalam kehidupan kewartawanannya. Dimulai dari pengekanan terhadap wartawan agar tidak meliput berita yang mengancam pemerintah dan wartawan yang hanya dijadikan alat atau corong penguasa yang harus mendukung kedudukan presiden.

Dalam menangani hal ini, PWI terkhususnya yang berada di Riau, memiliki peran dalam membantu mengatasi masalah-masalah kewartawanan. PWI Riau juga berperan dalam menyaring anggota wartawan agar tidak adanya wartawan “Bodrek” atau yang disebut wartawan gadungan.

Hal ini dikarenakan surat kabar yang ada di Medan yang tidak memiliki modal cukup, pimpinan redaksi hanya membagikan surat tugas tetapi para wartawannya tidak diberi gaji. Banyak sekali ditemukan pada zaman Orde Baru wartawan yang tidak digaji sama sekali oleh pimpinan redaksinya. Wartawan gadungan yang tidak digaji ini juga tidak memiliki pengawasan di Riau dikarenakan mereka bukan bagian dari PWI. Sehingga PWI Riau menyarankan, apabila seorang narasumber merasa dirugikan oleh wartawan gadungan tersebut, segera melaporkan hal tersebut kepada polisi.

Namun sayangnya, dimasa Orde Baru menangkap seorang wartawan gadungan harus berpikir sepuluh kali. Hal ini dikarenakan, wartawan memiliki kesetiaan terhadap sesama kawannya. Sehingga apabila terjadi suatu penangkapan terhadap wartawan gadungan, maka wartawan yang lain akan ikut berurusan dengan pihak yang berwajib agar kawannya dapat dilepas. Maka dari itu polisi lebih memilih jalur damai dari pada harus berhadapan dengan keributan wartawan-wartawan.

PWI Riau akhirnya mengambil tindakan dengan yang dinamakan “Testing”. Testing sendiri adalah sebuah tes yang dilakukan terhadap para wartawan-wartawan Riau dengan mengujikan pemahaman-pemahaman umum dan pemahaman jurnalistik.

Alasan dilakukannya testing terhadap wartawan-wartawan Riau adalah, kebanyakan dari wartawan yang ada di Riau merupakan wartawan yang memiliki riwayat pendidikan sampai SLTA. Bahkan Ristje menyebutkan, para wartawan Riau dahulu ada yang hanya tamatan SD. Maka untuk itu diperlukannya testing agar tidak adanya pemberitaan yang membahayakan serta yang menjatuhkan organisasi wartawan seperti PWI Riau. Hingga kini, testing terhadap wartawan masih dilakukan. Testing tersebut sekarang bernama UKW (Unit Kompetensi Wartawan).

PWI Riau juga berperan meningkatkan kemampuan wartawan, baik dari segi teknik jurnalistiknya maupun dari KLW (Karya Latihan Wartawannya). KLW hanya bisa dilaksanakan dengan syarat sudah menjadi Anggota Muda, minimal menjadi Anggota Madya baru bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PWI Riau. Tertibnya seorang wartawan Riau diatur dalam sebuah kode etik. PWI Riau juga melakukan pengawasan terhadap para wartawan-wartawan Riau melalui kode etik. Walaupun masih terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi, di Riau, kasus-kasus pelanggaran yang membahayakan wartawan di masa Orde Baru hampir tidak pernah terjadi.

c. Aktifitas PWI Riau Setelah Resmi Terbentuk

Pengurus periode pertama PWI Cabang Riau pertama kali disahkan oleh Pengurus Pusat PWI pada tahun 1964 dengan jabatan dari tahun 1964-1966. Dikarenakan kepengurusan periode pertama telah berakhir, maka untuk periode kedua dilakukan Rapat Anggota PWI Cabang Riau. Pertemuan tersebut dilaksanakan sekitar bulan Maret 1966 di Gedung Daerah, membicarakan tentang status PWI Cabang Riau serta kevakuman kepengurusan di organisasi tersebut. Pertemuan itu akhirnya berhasil menyusun kembali pengurus PWI Cabang Riau yang terdiri atas: Ketua Umum G.N.T Ilyas, Ketua I Letda M. Noer, Ketua II Moeslim Roesli, Ketua III Khairul Harum, Sekretaris Moeslim Kawi, Wakil Sekretaris M. Ali BA, dan Bendahara Busra Algerie.

Menurut (Roesli, 2005), sebelum kepengurusan tersebut disahkan oleh PP-PWI, telah terjadi sebuah konflik. Konflik tersebut ialah timbulnya gerakan upaya untuk melengserkan Gubernur Kaharoeudin Nasution. Kejadian ini kemudian dikenal sebagai “Peristiwa 30 April 1966”. Dalam kejadian itu, terlibat dua orang wartawan yaitu T. Rashmy Saleh (Pemberitaan Angkatan Bersenjata – PAB), dan GNT. Ilyas (Ketua PWI Riau).

Dikarenakan T. Rashmy Saleh bukanlah merupakan anggota PWI Riau, maka PWI Riau tidak menindak lanjuti tindakan T. Rashmy Saleh atas keikut-sertaannya dalam gerakan tersebut. Berbeda dengan GNT. Ilyas yang saat itu sedang menjabat sebagai Ketua PWI Riau, perbuatan yang ia lakukan sangatlah tidak dibenarkan oleh pengurus maupun anggota PWI lainnya. Apalagi GNT. Ilyas sampai membawa nama organisasi dengan menggunakan kop surat dan cap PWI.

Sebagai konsekwensinya, GNT. Ilyas dinonaktifkan dari jabatan pengurus maupun keanggotaan PWI, dan hal ini disepakati oleh seluruh anggota yang hadir pada Rapat Pleno PWI Riau (Roesli, 2005).

Rapat tersebut menetapkan beberapa pengurus periode kedua setelah kepengurusan PWI Cabang Riau disahkan pada tahun 1964. Dan merupakan kepengurusan PWI Cabang Riau pertama untuk masa bakti 1966-1968. Jumlah wartawan di Riau tidak sebanyak saat ini. Tidak lebih dari 20 orang, hal ini dikarenakan wartawan yang telah diterima dan menjadi anggota PWI, kemudian mendapatkan pekerjaan lain, maka profesi wartawan ditinggalkannya. Apabila dia berhenti dari pekerjaannya, maka ia akan kembali lagi menjadi wartawan. Pada awal-awal PWI Cabang Riau berdiri, juga jarang diadakan pertemuan-pertemuan. Terkadang pesan dan perkembangan organisasi lebih sering disampaikan secara beranting dari mulut ke mulut.

Ketika masa kepengurusan periode dua berakhir, maka disusun kembali pengurus untuk periode ketiga ketika H. Busra Algerie dan Marlis Ramali kembali dari mengikuti Kongres PWI di Manado. Rapat pengurus tersebut diadakan sekitar bulan September 1970, dihadiri oleh 10 orang Anggota Biasa. Pada susunan pengurus periode ketiga ini berhasil terpilih ketuanya yaitu Busra Algerie dan Zuhdi BA sebagai wakil ketuanya. Susunan yang telah dibentuk dilaporkan ke PWI Pusat pada bulan Oktober 1970 melalui surat nomor P.101/B-2/X/1970. PP-PWI melalui suratnya 12 Oktober 1970 dengan nomor 036/P.P/1970, mengesahkan susunan pengurus PWI Cabang Riau untuk masa bakti terhitung dari 4 Oktober 1970 sampai 4 Oktober 1972 (Tim PWI Cabang Riau, 1996).

Saat Kongres PWI ke-XIV diadakan di Palembang pada bulan Oktober 1970, terjadi dua kepengurusan PWI Pusat. Yakni Kepengurusan BM. Diah (Ketua Umum), Manai Sopian, H. M. Hamidy, P. G. Togas (Sekretaris Jenderal), T. Jously (Wakil Sekjen), Deddy Soemitro (Bendahara), dan Moegianto (Wakil Bendahara. Dan Kepengurusan Rosihan Anwar (Ketua Umum), L. E. Manuhua, Kol. Sugiarto Surojo, Jakob Oetama (Sekretaris Jenderal), Zein Effendi SH (Wakil Sekjen), H. M. Said Budiarti (Bendahara) dan R. P. Hen Kah (Wakil Bendahara).

Keberhasilan Kongres PWI ke-XIV juga terlihat dari adanya pergantian Mahbub Junaidi yang merupakan Ketua Umum PWI periode 1968-1971 (Deferentian, 2015). Akan tetapi, turunnya Mahbub Junaidi membuat perpecahan yang disebabkan adanya perbedaan idealisme yang dimiliki oleh BM. Diah dan Rosihan Anwar. Dengan adanya perpecahan tersebut, pada tanggal 17 Januari 1970, kelompok BM. Diah mengirimkan surat ke PWI Cabang Riau yang menyatakan kepengurusan PWI Riau untuk sementara waktu dibekukan.

Hingga pada tanggal 17 Januari 1971, PP-PWI mencabut surat pengesahan nomor 036/P.P/1966, tertanggal 17 September 1966 dan menunjuk caretaker untuk membenahi organisasi PWI Cabang Riau. Setelah bekerja selama empat belas bulan, caretaker berhasil menyusun personil pengurus PWI Riau periode keempat tahun 1971-1973 dengan Ketua Zuhdi, Wakil Ketua Busra Algerie. Pada 5 Maret 1971, PP-PWI mengesahkan susunan pengurus PWI Cabang Riau tersebut dengan Surat Keputusan nomor 014/P.P/1971.

Pada bulan Desember 1973, PP-PWI mengadakan Kongres XV Tretes, Jawa Timur. Kongres ini mengakhiri dualisme yang terjadi antara PWI BM. Diah dan PWI Rosihan Anwar. Di Kongres ini juga, membahas mengenai penetapan program kerja serta beberapa perubahan dalam pelaksanaan organisasi PWI, seperti penertiban Kartu Anggota PWI dan Kartu Pers. Kemudian memulai kegiatan pendidikan kewartawanan melalui Karya Latihan Wartawan (KLW), serta melakukan perubahan masa bakti kepengurusan tingkat pusat dan cabang serta perwakilan. Pada tingkat cabang dan perwakilan di seluruh Indonesia, kepengurusan dilakukan dari dua tahun menjadi empat tahun sekali.

Perpanjangan masa kerja kepengurusan periode kelima seperti yang diputuskan oleh Kongres tersebut, maka PWI Cabang Riau segera melakukan pengesahan kepengurusan periode kelimanya pada tanggal 12 Desember 1973 dengan Ketua: Drs. Rustam S. Abrus dan Wakil Ketua:

Zuhdi BA melalui Surat Keputusan PP-PWI nomor 033/PP/1973 yang juga menetapkan perpanjangan masa kerja pengurus PWI Riau dari tahun 1973-1975.

Masa kepengurusan periode kelima ini berlangsung dari tahun 1973-1977. Belum sampai akhir masa kepengurusan, Drs. Rustam S. Abrus mengundurkan diri dari jabatannya pada Januari 1976. Hal ini dikarenakan, Rustam S. Abrus dimutasikan oleh Gubernur Riau sebagai Sekretaris Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkalis.

Akhirnya setelah melalui rintangan yang panjang, pada tanggal 9 September 1976, tim formatur yang telah ditetapkan mengadakan rapat di Gedung Veteran Bhaskara Purna Yudha untuk menetapkan pengurus pergantian antar waktu dalam periode kelima. Hasilnya ialah, Zuhdi BA sebagai Ketua dan Syafri Segeh sebagai Wakil Ketua, Harun Al Rasyid sebagai sekretaris, Rusjdi S. Abrus sebagai wakil sekretaris dan Saprilis BA sebagai bendahara.

Setelah mendapatkan pengesahan dari PWI Pusat, pengurus PWI Cabang Riau segera menyusun empat bidang program kerja tahun 1976/1977. Program kerja tersebut ialah: (1) Menetapkan uang iuran anggota setiap bulan sebesar Rp. 100. (2) Untuk meningkatkan keuangan PWI, maka setiap anggota yang memperoleh biaya perjalanan keluar daerah dipungut lima persen dari jumlah dana yang diperolehnya dari berbagai sumber yang menjadi partner PWI. (3) Selain itu, di bidang kesejahteraan wartawan, ditetapkan untuk mempejuangkan biaya pembinaan serta pendidikan kewartawanan kepada Pemda Riau melalui APBD. (4) Mengusahakan lahan untuk perumahan wartawan. (5) Memperjuangkan pengadaan Balai Wartawan melalui APBD. (6) Menetralisir badan hukum pendirian Yayasan Kesejahteraan Wartawan (Roesli, 2005).

Pada 25 Agustus 1981, diadakan rapat anggota PWI Cabang Riau di Balai Wartawan jalan Sumatera, Pekanbaru. Dari 20 orang yang diundang, yang hadir 16 orang, termasuk anggota biasa dan calon anggota. Pada rapat ini berhasil dibentuk pengurus baru periode 1981-1985 oleh tiga orang formatur, masing-masing: Rusydi S. Abrus, Eddy Mawuntu dan Rida K Liamsi.

Susunan pengurus PWI Cabang Riau periode keenam tahun 1981-1985 yang ditetapkan formatur adalah: Moeslim Kawi (Ketua Umum), Rusydi S. Abrus (Wakil Ketua I), Syafri Segeh (Wakil Ketua II), Eddy Mawuntu (Wakil Ketua III), Ristje (Sekretaris) dan Hikmat Ishak (Wakil Sekretaris), M. Ali Bakri (Bendahara), Mulyadi (Wakil Bendahara). Di periode ini, PWI Cabang Riau banyak mengeluarkan surat rekomendasi kepada para anggotanya agar menjadi Pimpinan Redaksi. Yaitu surat rekomendasi yang dikeluarkan untuk Rida K. Liamsi (skm. Genta).

Dari temuan penulis, Moeslim Kawi yang saat itu mengajukan diri menjadi Pemimpin Redaksi Genta, mencoba menata kembali Genta dengan mengandalkan tenaga-tenaga muda, seperti Denny Kurnia, Taufik Ikram Jamil, Said Suhil Achmad, Husni Ch., Bahtiar dan Harman. Berbagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan skm. Genta terus dilanjutkan, tidak saja yang berkaitan dengan mutu pemberitaan, tapi juga tata letak dan perwajahan (layout), distribusi dan sirkulasi, serta program Koran Masuk Desa (KMD) yang dicanangkan Deppen sejak 1984 (Roesli, 2005).

Pada 25 Agustus 1986 kembali diadakan rapat untuk memilih kepengurusan PWI Cabang Riau di Balai Wartawan periode tahun 1986-1990. Susunan kepengurusan kemudian diumumkan oleh tim formatur dengan nama-nama pengurusnya yaitu: Tukidi Nurendro (Ketua Umum), Marlis Ramali (Wakil Ketua I), Mulyadi (Wakil Ketua II), A. Jeck Marbun (Wakil Ketua III), Ristje (Sekretaris), Akmal Famajra (Wakil Sekretaris), M. Ali Bakri (Bendahara) dan Yaunusar Bakar (Wakil Bendahara).

Susunan kepengurusan tersebut kemudian dilaporkan ke PP-PWI pada tanggal 26 Agustus melalui surat nomor 346/B-I/1986. Namun setelah dua bulan, PP-PWI tidak kunjung memberikan surat pengesahan. Hingga tanggal 1 November 1986, pengurus baru PWI Cabang Riau akhirnya disahkan oleh pengurus Pusat PWI dengan SK Nomor 017/PP-PWI/1986 yang ditandatangani oleh Zulharman (Ketua) dan Atang Ruswita (Sekretaris Jenderal) dan dengan adanya perubahan-perubahan terhadap beberapa pengurusnya.

Pada periode 1986-1990 ini PWI Cabang Riau mencoba melakukan penerimaan anggota baru melalui testing. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, testing diadakan agar wartawan-

wartawan gadungan atau yang disebut dengan wartawan “Bodrek” tidak sembarangan mengambil berita hingga membuat citra wartawan menjadi buruk. Untuk pelaksanaan testing pun harus melalui beberapa syarat diantaranya memiliki surat tugas dari Pimpinan Redaksi serta mempunyai ijazah minimal SLTA.

Karena testing tersebut dilakukan oleh PWI Cabang Riau, mengacu pada keputusan Kongres PWI ke-XVII di Manado dalam penertiban profesi kewartawanan. Meskipun di dalam PD/PRT belum diatur secara tegas, terutama untuk calon anggota. Akhirnya, pada Kongres ke-XVIII di Samarinda diputuskan, bahwa dalam penerimaan anggota PWI dilakukan testing. Kemudian dipertegas lagi pada Kongres di Bandar Lampung, bahwa calon anggota PWI diwajibkan mengikuti pendidikan jurnalistik, baik di lembaga Perguruan Tinggi maupun informal yang diakui oleh PWI.

Gambar 2. Kongres PWI di Samarinda, Foto Bersama dengan Ketua PWI Pusat, Zulharman dan Ketua PWI Riau, Marlis Ramali serta Sekretaris PWI Riau, Akmal Famajra dan Bendahara PWI Riau, Yainusa Bakar.



Sumber: Arsip dokumentasi yang disimpan oleh Akmal Famajra.

Pada Desember 1989, diadakan kembali rapat anggota untuk pergantian pengurus periode kesembilan serta penyusunan program kerja PWI Cabang Riau. Rapat anggota yang diadakan di Hotel Indrayani Pekanbaru merupakan rapat pertama yang diselenggarakan di luar Balai Wartawan. Rapat anggota ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Riau dan merupakan kegiatan yang kedua kalinya yang dihadiri dan diresmikan oleh Gubernur. Rapat tersebut berhasil memilih pengurus PWI Cabang Riau dengan susunan: Rida K. Liamsi (Ketua Umum), Akma Famajra (Sekretaris), Yaunusar Bakar (Bendahara).

Pada masa kepengurusan Rida K. Liamsi inilah PWI Riau memiliki beberapa kemajuan. PWI Riau berhasil memperjuangkan rehabilitasi Balai Wartawan berupa penambahan ruangan rapat, penjaga kantor dan kantin. Semula direncanakan untuk pembangunan gedung baru dua lantai. Namun karena kegiatan MTQ Nasional ke-17 serta kegiatan MTQ Wartawan ASEAN pertama yang memerlukan dana lebih besar, maka rencana pembangunan gedung baru tersebut, diganti dengan rehabilitasi berat terhadap Balai Wartawan yang menelan biaya sekitar Rp 90 juta.

Gambar 3. Penandatanganan Prasasti Perluasan Balai Wartawan Noerbahrij Yoesoef oleh



Gubernur Riau Soeripto dan Rida K. Liamsi Sumber: Buku Putih PWI Riau Tahun 1996.

Dalam pemilihan pengurus baru, peserta Konpercab sepakat memilih kembali Rida K. Liamsi. Kemudian untuk menyusun personil pengurus, maka dipilih tim formatur. Setelah tim formatur diberi mandat penuh untuk menyusun personil pengurus PWI periode kesepuluh tahun 1995-1999, maka terpilih kembali Rida K. Liamsi sebagai Ketua.

Pada periode kesepuluh ini, PP-PWI bersama dengan Menteri Penerangan dan Menteri Agama telah menetapkan Pekanbaru menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan MTQ Wartawan ASEAN. Kegiatan yang pertama kalinya berlangsung di Pekanbaru untuk kawasan Asia ini, dibuka oleh Menteri Agama Tarmizi Thaher dan ditutup oleh Menteri Penerangan Harmoko.

Kemudian diperiode ini juga telah berhasil membentuk Koperasi wartawan yang dinamakan "Kalam Perkasa". Koperasi yang bergerak dalam kegiatan serba usaha ini, memiliki simpanan pokok sebesar Rp 50.000,- dan simpanan wajib setiap bulan Rp 5.000,-. Koperasi wartawan ini memiliki fungsi untuk mengayomi para wartawan-wartawan mengingat keadaan ekonomi dimasa Orde Baru yang tidak sama. Strata kehidupan para wartawan saat itu ditentukan pada jumlah eksamplar yang terbit, jika eksamplar yang terbit sedikit jumlahnya, maka biaya yang didapat hanya untuk menutup biaya beli kertasnya.

Ketika PWI Riau sudah berhasil membentuk Koperasi Wartawan dengan nama 'Kalam Perkasa', maka Koperasi Wartawan kemudian membangun sebuah perumahan wartawan sebagai usahanya yang saat itu berhasil. Perumahan wartawan tersebut berada di Desa Kualu, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, untuk 200 keluarga anggota PWI Riau yang berdomisili di Pekanbaru (Roesli, 2005).

Hambatan yang Dihadapi PWI Riau dalam Menjalankan Tugas Peliputan Pada Masa Orde Baru

Banyak sekali rintangan yang harus dihadapi para wartawan terutama yang berada dipusat Jakarta saat masa Orde Baru. Dengan begitu, hambatan yang dihadapi oleh PWI Pusat pun juga semakin banyak. Berbeda dengan PWI Cabang Daerah yang tersebar diseluruh Indonesia. Konflik-konflik antara wartawan dengan pemerintah sangat sedikit sekali ditemukan. Bahkan, kasus pembredelan surat kabar seperti yang terjadi pada media Tempo sangat jarang ditemukan. Dalam kasus ini, PWI Cabang Riau termasuk PWI yang bisa dikatakan tidak pernah memiliki konflik dengan pemerintah daerah.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa informan, hambatan yang sering dihadapi oleh PWI Riau adalah hambatan modal dan dana. Ekonomi disaat masa Orde Baru terutama di Riau, belum sebgus seperti saat ini, hal itulah yang menjadi alasan mengapa modal dan dana adalah hambatan terbesar PWI Riau. PWI Riau pada saat itu terkadang mendapatkan dana pinjaman saat melakukan kegiatan programnya tetapi dana pinjaman tersebut tidak tercantum didalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Bebeda dengan

sekarang, PWI Riau yang sudah memiliki bidang Humas akan memberikan uang pembinaan apabila PWI Riau akan melakukan kegiatan.

Dari beberapa hambatan dan permasalahan yang sudah disebutkan, terdapat hambatan terakhir yang dihadapi bersama oleh media pers dan wartawan. Salah satu ketentuan yang berlaku bagi media pers dan wartawan adalah dilarangnya memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan pihak kepolisian. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pihak kepolisian yang bukan merupakan Kepala Polisi Daerah (Kapolda) dilarang untuk diwawancarai.

PWI Riau juga merupakan organisasi profesi yang dituntut untuk tidak berpihak kepada siapa-siapa. Meskipun PWI merupakan organisasi pemerintah, tetapi PWI Riau tetap harus mengambil sikap netral terhadap kasus media-media yang pernah dibredel oleh pemerintah baik di daerah maupun di pusat.

PENUTUP

Terbentuknya PWI Riau yang semula nama adalah PWI Perwakilan Riau kemudian menjadi PWI Cabang Riau, harus melewati lika-liku dalam pembentukannya. Dalam membentuk suatu organisasi Cabang PWI harus memenuhi persyaratan khusus diantaranya harus memiliki dua terbitan pers atau sekurang-kurangnya 15 wartawan berstatus Anggota Biasa. Di Riau, terbentuknya PWI Cabang ini adalah pada tanggal 23 Januari 1964 dengan ketua pertamanya yaitu, Aspan Diar. Di awal terbentuknya PWI Perwakilan Riau ini, organisasi ini masih belum memiliki tempat permanennya. Sehingga dahulu mereka masih berpindah-pindah tempat, hingga pada tahun 1978, PWI Cabang Riau memiliki tempat permanen yang bernama Balai Wartawan Riau. Balai Wartawan ini sepenuhnya didanai oleh Gubernur Provinsi Riau yang ke-4 yaitu Soebrantas Siswanto (1978-1980).

PWI Riau memiliki beberapa peranan penting terhadap media massa dan beberapa wartawan yang ada di Riau. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka memperjuangkan sebuah alat mesin cetak agar media massa yang ada di Riau tidak mencetak surat kabar ke Jakarta. Dengan dukungan Gubernur Riau saat itu akhirnya diutuslah Busra Algerie dan Bur S. Adam ke Jakarta untuk mendapatkan mesin cetak dari Menteri Penerangan. Akan tetapi karena berbelitnya birokrasi, maka dua utusan tadi belum berhasil menemui Menteri Penerangan. Moeslim Roesli ketika itu dengan semangatnya, berhasil menemui Menteri Penerangan Ruslan Abdulgani. Berkat Moeslim Roesli, Ruslan meminjamkan sebuah alat mesin cetak bekas dan saat itu diketahui hanya digunakan oleh surat kabar Otonom, akan tetapi tidak bertahan lama pemakaiannya. Mesin cetak tersebut kemudian ditempatkan di Jalan Kuantan (kantor Riau Pos tahun 1996). PWI Riau juga memberikan wawasan dan pemahaman kepada watawan tentang dunia jurnalistik. Tak hanya itu, PWI Riau juga menjadi wadah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar organisasinya. PWI Riau mengganti kepengurusannya setiap sekali dua tahun, namun diubah lagi menjadi setiap sekali empat tahun. Dikarenakan beberapa anggota ada yang kerja rangkap (bekerja sebagai wartawan namun juga menjadi Pegawai Negeri), maka belum habis masa kepengurusan, anggota PWI Riau yang menjabat harus mengundurkan diri dari jabatan PWI-nya dikarenakan ada yang naik pangkat (pekerjaan PNS-nya) dan ada yang dipindah tugaskan jabatannya (seperti diangkat Gubernur menjadi biro Humas di Kantor Gubernur). Hingga masa periode Rida K. Liamsi tahun 1990-1999, PWI Riau memiliki keberhasilan diantaranya memperjuangkan rehabilitasi Balai Wartawan, melakukan perubahan terhadap pemakaian istilah "Rapat Anggota" menjadi "Konfrensi Cabang", serta pembentukan Koperasi wartawan "Kalam Perkasa".

Umumnya, PWI Cabang tidak memiliki kasus-kasus berat seperti kasus yang dialami oleh PWI Pusat. Hambatan yang dihadapi oleh PWI Riau umumnya hanya seperti kekurangan modal dan dana. Belum lagi dengan adanya wartawan-wartawan mafia yang tidak digaji oleh Pimpinan

Redaksinya, mereka melakukan beberapa tindakan kriminal terhadap beberapa narasumber. Seperti pemerasan, penipuan dan mengancam narasumber. Adanya wartawan-wartawan gadungan, membuat PWI Riau harus mengambil sikap ketika melakukan seleksi terhadap para calon-calon wartawan yang kemudian dikenal dengan adanya Testing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnus, Sri Hadijah. (2015). Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia. *Al-Munzir: IAIN Kendari*, Vol. 8, 1979-4894.
- Asril, Zaili dkk. 2002. *Tragedi Riau Menegakkan Demokrasi*. Pekanbaru: Panitia Peringatan 17 Tahun "Peristiwa 2 September 1985".
- Bungin, Burhan. 2014. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Perdana Media.
- David T. Hill. 2011. *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Deferentian, Citriana. (2015). *Konflik Kepentingan dalam Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tahun 1970-1971*. Published Dissertation. Surakarta: Sebelas Maret University.
- Gottschalk, Louis. 1983. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hartono, Tri. (2019). Peranan Moeslim Roesli Dalam Perkembangan Pers di Riau Tahun 1954-1975. *JOM FKIP – UR*, Vol. 6, 2355-6897. Pekanbaru: Riau University.
- Kurniadi, Alan. (2018). *Sistem Pengaduan Peristiwa Kepada Media Pers Berbasis Android dengan Google Maps API*. Published Dissertation. Pekanbaru: Sultan Syarif Kasim Islamic University.
- Moeslim Roesli, Dkk. 2005. *Menerobos Mitos, Seabad Pers Riau*. Pekanbaru: PWI Cabang Riau.
- Suhartono & W Pranoto. 2010. *Teori & Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tim PWI Cabang Riau. 1996. *Buku Putih Daftar Wartawan Anggota PWI Cabang Riau 1996-1997*. Pekanbaru: PWI Cabang Riau.
- Tim PWI Cabang Riau. 1996. *Sejarah dan Bunga Rampai Perkembangan Pers di Riau*. Pekanbaru: CV. Tirta Kencana Pekanbaru.